



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI** *Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## BENCANA KEKERINGAN DAN KRISIS AIR BERSIH DI SITUBONDO

**Riza Asyari Yamin**

Analisis Legislatif Ahli Pertama

[riza.yamin@dpr.go.id](mailto:riza.yamin@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa atau garis ekuator sehingga membuat Indonesia menjadi negara beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi serta paparan sinar matahari yang cukup merata sepanjang tahun. Kondisi geografis yang beragam mulai dari pegunungan hingga pesisir pantai mengakibatkan Indonesia memiliki berbagai macam jenis bencana alam seperti banjir, longsor, gempa, atau bahkan kekeringan. Di antara beberapa bencana yang disebutkan di atas, kekeringan sering luput dari perhatian jika dibandingkan dengan bencana lainnya. Namun, bencana kekeringan justru dapat berdampak secara luas terhadap kondisi kehidupan masyarakat sekitar terutama terkait dengan krisis air bersih, turunnya produksi pertanian, bahkan dapat menyebabkan gagal panen.

Salah satu lokasi di Indonesia yang saat ini mengalami bencana kekeringan dan krisis air bersih yaitu Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo menyebutkan bahwa terdapat empat kecamatan yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih, yaitu Suboh, Banyuputih, Arjasa, dan Jatibanteng. Sejumlah warga bahkan harus berjalan kaki cukup jauh dan membawa jeriken air sebagai wadahnya untuk dapat mengakses air bersih. Kondisi ini tentunya dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar karena air merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan manusia, baik itu untuk konsumsi, mandi, maupun kegiatan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, BPBD Situbondo telah melakukan pendistribusian air bersih, salah satunya di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh pada tanggal 25 September 2025.

Bencana kekeringan dan krisis air bersih dapat terjadi di Indonesia dikarenakan adanya fenomena *El Nino* yang mengakibatkan menurunnya intensitas hujan di beberapa daerah. Selain itu, adanya proses perubahan lahan yang semula kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan juga dapat membuat kemampuan tanah untuk menampung air menjadi berkurang, sehingga menyebabkan berkurangnya cadangan air di dalam tanah. Minimnya sistem pengelolaan air hujan dan jumlah penampungan air hujan juga dapat membuat masyarakat mengalami krisis air bersih.

Bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Situbondo bukan hanya terjadi pada tahun ini saja, tetapi sudah pernah terjadi juga pada tahun 2024 yang melanda delapan kecamatan dan berdampak pada sekitar dua belas ribu jiwa. Agar kondisi ini tidak terjadi secara terus menerus dan berulang di setiap tahunnya, perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam jangka panjang. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi seperti pengelolaan air dan penerapan pola hemat air. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun embung atau waduk lokal sebagai wadah penampungan air. Di sisi lain, pemerintah juga dapat membuat kebijakan mengenai lokasi mana saja yang dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, dan lahan mana yang harus tetap menjadi hutan atau daerah tangkapan air.

## Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi VIII dapat mengambil beberapa langkah strategis guna menanggulangi bencana kekeringan yang sedang terjadi maupun mitigasi di kemudian hari. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat meminta Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan BPBD untuk memastikan efektivitas terkait penyaluran bantuan dan penanggulangan bencana kekeringan serta krisis air agar mendapat perhatian yang cukup dan setara dengan bencana-bencana lainnya. Sedangkan melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong adanya alokasi dana yang responsif terhadap bencana kekeringan, seperti alokasi dana untuk sosialisasi dan edukasi pengelolaan air bersih di masyarakat, distribusi air bersih, pembangunan embung atau waduk lokal sebagai penampungan air, maupun pembuatan sumur bor agar dampak kekeringan dapat di minimalisasi dalam jangka panjang.

## Sumber

antaranews.com, 25 September 2025;  
detik.com, 25 September 2025;  
*Koran Jakarta*, 26 September 2025;  
radarsitubondo.jawapos.com, 11 Oktober 2024; dan  
tempo.co, 25 September 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetiawan

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*